

Policy Evaluation Kedudukan Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014

Muswandar

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=130901&lokasi=lokal>

Abstrak

Peraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telah ditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untuk melaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untuk melakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat dan mengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanya diberikan Surat Tanda Registrasi (STR). Selain itu kebijakan juga telah memisahkan kesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap konten kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isi kebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengan kondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakan terkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatan masyarakat. Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuah profesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakan tidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan pada ranah profesi bukan syarat kelulusan (exit exam). Solusi STR bagi tenaga kesehatan masyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatan lingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.

Regulations on health workers have been scattered in various laws and regulations, therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating Health Manpower. As a profession that has been established by law requires public health workers to implement what is saved according to the content / content of the policy. The content of policies related to public health personnel, among others, the obligation to register before doing the profession praxis in the community and to take the competency exam as a condition of registration of the registration which later on is given the Registration Certificate (STR). In addition, the policy has also separated the environmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher is interested to conduct policy evaluation especially to policy content related to public health worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected using retrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in the field, related policy review literature, theories about public health sciences and the views of public health experts. The result of the research is known that health workers deserve to be called as a health profession in accordance with policy content. The competency test carried out does not violate the policy content during the competency test conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for public health personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of Health Regulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health from public health groups is not found in the literature.